

**AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
JAJARAN BARU KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

WAHID NANUNG APRIANSYAH

07011381320011

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Jajaran Baru Kecamatan Magang Sakti Kabupaten Musi Rawas” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018

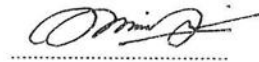
Ketua:

1. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002



Anggota:

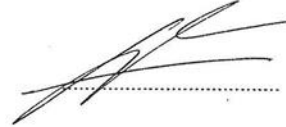
2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002



3. Dr Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



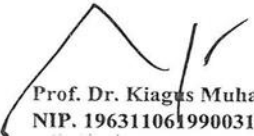
4. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001




Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001


Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
JAJARAN BARU KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

SKRIPSI

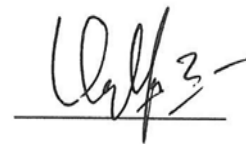
Oleh:

WAHID NANUNG APRIANSYAH
07011381320011

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018

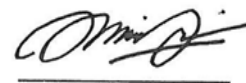
Pembimbing I

Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP.198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aku akan terus berjalan melampaui batas sampai Tuhan berkata ini sudah waktunya untuk pulang.” (Wahid Nanung Apriansyah)

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua OrangtuaKu
2. Saudara-saudaraKu
3. Sahabat-sahabatKu
4. Almamaterku

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi oleh belum terealisasinya target pencapaian program pembangunan Alokasi Dana Daerah di Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya sarana air bersih, infrastruktur jalan desa dan pelayanan kesehatan yang belum dirasakan hasilnya oleh masyarakat di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas belum sesuai dengan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Haylar. Hal tersebut dikarenakan 4 dari 6 dimensi yang menjadi tolak ukur teori akuntabilitas itu sendiri masih belum optimal. Perlunya pengawasan yang lebih matang lagi dari pemerintahan agar akuntabilitas ataupun pengalokasian dana ke Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang berjalan dapat sesuai dengan hasil dan target yang akan dicapai, menyarankan kepada segala kalangan masyarakat desa bahwa dalam setiap segala yang berurusan dengan dana harus ikut dalam melakukan pengawasan ataupun tiap gerak geriknya sehingga dapat mengurangi kasus KKN yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang golongan atas dan Meningkatkan pendidikan masyarakat desa agar peluang untuk mendapatkan pemerintah desa yang berpendidikan menjadi besar.

Kata kunci : Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

This thesis background backs by not achieving target realization of development programs in the Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. It can be seen from the lack of clean water, rural road infrastructure and health services that have not been felt by the people in the field result. The purpose of this study was to determine how the accountability of the Village Fund Allocation (ADD) in Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. This study uses qualitative descriptive method, whereas for data collection technique using the technique of in-depth interview, documentation and observation. These results indicate that the accountability of the Village Fund Allocation (ADD) in Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas accountability is not in accordance with the theory put forward by Haylar. That is because four dimensions of 6 dimensions as a benchmark for accountability theory itself is still not optimal. The need for surveillance more mature again on the government to be accountable or allocating funds to the Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Baru Kabupaten Musi Rawas running can be in accordance with the results and targets to be achieved, suggest to all the villagers that in each of all who deal with the funds to be participate in monitoring or each motion so as to reduce cases of corruption that could have been done by the elite and villagers to Improve education opportunities to get educated village government be great.

Keywords : Accountability and Village Fund Allocation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESAJAJARAN BARU KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik Program Strata Satu (S-1) Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat ridho, rahmat kesehatan, rejeki dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Kedua Orang tuaku Ayahanda Iul Katiran dan Ibunda Tarlina S.Pd Terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat dengan segenap cinta dan kasih sayang serta kesabaran yang tak pernah padam dan tak lekang oleh waktu, dukungan moril dan finansial yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

6. Ibu Ermanovida, S.Sos M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si, dan Ibu Dra. Martina, M.Si, sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, pada periode masa jabatan tahun ajaran 2014 – 2018.
8. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Perangkat desa dan masyarakat Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
12. Teman-Teman Seperjuangan Administrasi Negara Angkatan 2013 terimakasih banyak.
13. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih buat doa dan dukungannya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan skripsi ini amin ya robbal'alamin.

Palembang, Juli 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR AKRONIM	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
B. Administrasi Negara	9
C. Pengertian Akuntabilitas	10
D. Alokasi Dana Desa	11
E. Teori yang digunakan	15
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Definisi Konsep.....	23
C. Fokus Penelitian	24
D. Unit Analisis	25
E. Informasi dan Key Informan	26
F. Jenis Data dan Sumber Data	27
G. Validitas Data	28

H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	33
1. Kondisi Geografis	33
2. Struktur Organisasi	39
3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	40
4. Penetapan Kinerja	41
5. Pengukuran Pencapaian Kinerja	44
6. Akuntabilitas Keuangan	45
B. Hasil dan Pembahasan	46
1. Legitimasi Pembuat Kebijakan	47
2. Perilaku Moral	52
3. Responsivitas	55
4. Keterbukaan	61
5. Penggunaan Sumber Daya Secara Optimal	70
6. Perbaikan Efisiensi dan Efektivitas	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

``Halaman

Tabel 1.1 Data Pengajuan dan Alokasi Dana Desa.....	3
Tabel 1.2 Data Pencairan Bertahap Alokasi Dana Desa.....	4
Tabel 1.3 Target dan Pencapaian Alokasi Dana Desa	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	24
Tabel 4.1 Misi dan Strategi Pembangunan	40
Tabel 4.2 Rencana Kinerja.Kecamatan Megang Sakti	42
Tabel 4.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kecamatan Megang Sakti	44
Tabel 4.4 Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Megang Sakti	45
Tabel 4.5 Hasil Pemilihan Kepala Desa Jajaran Baru	48
Tabel 4.6 Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....	60
Tabel 4.7 Jumlah Pejabat dan Perangkat Desa	72
Tabel 4.8 Daftar Perlengkapan Desa.....	74
Tabel 4.9 Data Penyaluran Dana Alokasi Desa	79
Tabel 4.10 Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Realisasi	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. 2.1 Skema Kerangka Berpikir	22
2. 4.1 Peta Orientasi Kabupaten Musi Rawas	35
3. 4.2 Batas Wilayah Kecamatan Megang Sakti	37
4. 4.3 Luas Wilayah Kecamatan	38
5. 4.4 Denah Peta dan Luas Daerah Desa Jajaran Baru	48
6. 4.5 Struktur Organisasi Desa Jajaran Baru	39
7. 4.6 Rapat Persiapan Realisasi Anggaran	64
8. 4.7 Inventaris Perlengkapan Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Megang Sakti	75

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dukcapil	: Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PU	: Pekerja Umum
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIUJK	: Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
BKL	: Batu Kuning Langkitan
STL	: Suku Kuning Langkitan
RAB	: Rancangan Anggaran Biaya

DAFTAR ISTILAH

<i>Agent</i>	: Agen
<i>Principal</i>	: Prinsip
<i>Responsiveness</i>	: Tanggung Jawab
<i>Intangible</i>	: Tidak Terwujud
<i>Documentation</i>	: Dokumen
<i>Triangulate</i>	: Triangulasi
<i>External</i>	: Keluaran
<i>Auditor</i>	: Audit
<i>Reward</i>	: Hadiah
<i>Punishment</i>	: Hukuman
<i>Input</i>	: Masukan
<i>Online</i>	: Menyala dalam Internet
<i>Output</i>	: Keluaran
<i>Outcome</i>	: Pemasukan

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi	94
Lampiran 2. Surat Izin Pengambilan Data dari Universitas Sriwijaya	95
Lampiran 3. Surat Tugas Pembimbing Seminar Usulan Skripsi	96
Lampiran 4. Lembar Konsultasi Bimbingan Proposal Pembimbing 1	97
Lampiran 5. Lembar Konsultasi Bimbingan Proposal Pembimbing 2	98
Lampiran 6. Matriks Wawancara	99
Lampiran 7. Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	107

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Administrasi Negara Lama diartikan sebagai ilmu negara sehingga membuat administrasi negara hanya terfokus pada organisasi dan manajemen internal dari aktivitas-aktivitas pemerintah, seperti anggaran negara, manajemen kepegawaian, dan pelayanan jasa saja. Frederickson (1971 : 52). Desa sebagai bentuk pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah oleh pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah diberi keleluasan untuk mengelola pemerintahnya secara otonom. Mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan mengatur segala kebutuhan untuk kepentingan masyarakatnya. Untuk mensinergikan kegiatan di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka dimulai dari tingkat paling bawah yakni perdesaan. Penyelenggaraan pemerintah desa selain desa diakui secara otonom, daerah wajib memberikan sumber pendanaan kepada desa untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memenuhi segala kebutuhannya.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong-royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat.

Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan Negara pada urusan terutama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa sering menjadi tidak berkelanjutan.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagai satuan yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengikuti dengan Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui Program Alokasi Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa sumber keuangan desa salah satunya berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Desa jajaran baru salah satu desa di kecamatan megang sakti kabupaten musu rawas. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata di indonesia desa jajaran baru mengajukan permohonan pencairan alokasi dana desa kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas melalui camat. Data pengajuan dan alokasi dana desa jajaran baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas tahun 2014, 2015, dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pengajuan dan Alokasi Dana Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, 2015 dan 2016

No	Pengajuan dan Alokasi	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Pengajuan dari pemerintah desa	Rp 1.000.000.000	Rp 1000.000.000	Rp 1000.000.000
2.	Alokasi dana desa yang ditetapkan	Rp 742.479.000	Rp 681.049.000	Rp 639.683.000
3.	Pencapaian	74,2 %	68,1 %	63,9 %

Sumber :Pemerintah Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).

Data pencairan alokasi dana desa Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas tahun 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 Data Pencairan Per-tahap Alokasi Dana Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, 2015 dan 2016

Tahapan Pencairan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
Tahap 1	1) Jalan/Jembatan, Poskesdes/Pustu, Air Bersih dan listrik	Rp. 480.000.000	1) Jalan/Jembatan, Poskesdes/Pustu, Air Bersih dan listrik.	Rp. 471.000.000	1) Listrik, air Bersih, sarana pendidikan/ke-sehatan bagi daerah terisolir	Rp. 420.000.000
Tahap 2	2) Peningkatan produksi pertanian.		2) Peningkatan produksi pertanian.			
	1) Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 262.479.000	1) Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 210.049.000	1) Peningkatan produksi pertanian.	Rp. 219.683.000
	2) Pasar desa/kec, modal transportasi		2) Pasar desa/kec, modal transportasi		2) Pengembangan usaha mikro kecil dan	
	3) Pengaspalan jalan anatar dusun.		3) Pengecoran jalan setapak pada setiap lorong desa		3) Renovasi kantor balai dasa.	
Jumlah		Rp. 742.479.000		Rp. 681.049.000		Rp. 639.683.000

Sumber : Pemerintah Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan ketentuan tersebut pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desadan Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes, PDPT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Dalam Pasal 4 Permendes No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten. Adapun laporan pertanggung jawaban kepala Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas mengenai target dan pencapaian desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Target dan Pencapaian Alokasi Dana Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, 2015 dan 2016

Tahun	Agenda	Fokus	Capaian ADD (%)	
			Target	Realisasi
2014	1. Pembangunan wilayah dan pedesaan 2. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan 3. Reformasi birokrasi	1. Jalan/Jembatan, Poskesdes/Pustu, Air Bersih dan listrik 2. Peralatan dan Modal kerja, serta Investasi 3. Penataan PNS, Kelembagaan, Sistem Pelayanan dan Sistem Penganggaran.	100	74,2 %
2015	1. Peningkatan produksi pertanian 2. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 3. Penciptaan Klaster Industri 4. Perluasan Sekala pemasaran	1. Peralatan, dana, kemitraan 2. Pasar desa/kec, modal transportasi, terminal, jalan antar desa, kecamatan antar wilayah 3. Pengecoran jalan setapak pada setiap lorong desa	100	68,1 %
2016	1. Penciptaan pusat – pusat ekonomi 2. Infrastruktur daerah tertinggal 3. Petugas penggerak pembangunan	1. Kawasan tumbuh lambat agar didukung fasilitas ekonomi 2. Listrik, air Bersih, sarana pendidikan/kesehatan bagi daerah terisolir 3. Perbaikan atau renovasi kantor balai desa	100	63,9 %

Sumber : Pemerintah Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan lihat berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan masih ada kesenjangan yang tidak sesuai dengan program yang ada dalam tabel tersebut, seperti belum terdapat adanya sarana air bersih, infrastruktur jalan desa, dan pelayanan kesehatan belum dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan belum ada di lapangan, akan tetapi dalam tabel 1.3 adanya program

tersebut tentang data target pencapaian ADD tahun 2016 bahwa hasil pencapaian target 63,9 % pembangunan dan masih ada program yang belum terrealisasi.

Dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajaran baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan perumusan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimana Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, serta menambah ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada masalah yang diteliti yaitu bagaimana Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) pada suatu

instansi pemerintahan desa jajaran baru baik itu kepala desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Masyarakat Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas agar dapat mengetahui dan menambah wawasan dalam meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.

b. Bagi Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan bagi instansi untuk memperbaiki pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya mewujudkan visi dan misi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin dan Ahmad. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta 1982
- Erlina, Omar dan Rasdianto. 2015 *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Litchfield Edward, 2007 *Notes on A General Theory of Administration*
- Frederickson. 1971 *toward a new public administration*, jakarta: summary
- Helden dan Richards. 2008. *Membentuk Kepribadian Anak “Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri”*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013 *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: MAP UGM dan Pustaka Belajar
- Mardiasmo. 2002 *Akuntansi Sektor Publik*, yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2013. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.
- Osborne, David & Peter Plastrik. (2000). *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha* (Terjemahan Ramelan Abdul Rosyid), Jakarta: PPM.
- Setiyono, Budi. 2014 *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: CAPS
- Sjarkawi. 2008. *Membentuk Kepribadian Anak “Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri”*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Vigoda, Eran. 2006. *Leadership Style, Organizational Politics, and Employees Performance*. Division Of Public Administration and Policy, School of Political Sciences, University Of Haifa Haifa Israel.

Peraturan-peraturan:

PP No.72 Tahun 2005 tentang *Pemerintah Desa*

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman *Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Bupati Musi Rawas No.7 Tahun 2015 tentang Pedoman *Pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Musi Rawas*

Sumber Jurnal dan Internet :

Siagian 2014 *Jurnal Administrasi Keuangan Negara* (Online) <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8535/6577> diakses 20 Oktober 2017) <http://paissues.blogspot.com/2011/10/toward-new-public-administration-h.html>

Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN

Loina Lalolo Krina P. 2013. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*(Online) <https://journal.prinsipakuntabilitas.ac.id/jkap/article/view/8434/63377> diakses 20 Oktober 2017)

Mulyana, Budi, 2013. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.(Online) (<http://jurnal-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-daerah.ac.id/jkp/lkj>. Diakses 23 Oktober 2017)

John M. Pfiffer dan Robert V <http://sobatbaru.blogspot.co.id/2008/05/pengertian-administrasi-negara.html> diakses 16 mei 2018)

Sulistiyani, *Tinjauan tentang akuntabilitas*.digilib.unila.ac.id/14662/12/BAB%20II.pdf16 mei 2018)

<https://www.mysciencework.com/publication/read/2183875/penerapan-otonomidesa-dalam-menguatkan-akuntabilitas-pemerintahan-desa-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-desa-aglik-kecamatan-grab#page-1>,(diakses 16 april 2018).

DiIulio, John J., Jr. 1987 *Governing Prisons: A Comparative Study of Correctional Management*. New York: Free Press. (<https://oied.ncsu.edu/selc/wp-content/uploads/2013/03/Principled-Agents-The-Cultural-Bases-of-Behavior-in-a-Federal-Government-Bureaucracy.pdf>, diakses 17 april 2018)

John M. Pfiffer dan Robert V. Pengertian Administrasi Negara. (Online) (<http://www.pelajaran.co.id/2017/01/10-pengertian-administrasi-negara-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses 21 september 2017)

Mustafa.2001. *Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang*. (Online),(<http://wikimedia.blogspot.co.id/2009/11/pengertian-administrasinegara.html>, diakses 21 September 2017)

Hormon. 1995. Pengertian Responsivitas. (*Online*)

http://kariono.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/67/2016/12/KULIAH-5_Responsivitas-profesionalisme.pptx, diakses 27 Maret 2018)

dari pada kepentingan umum. Rendahnya aspek etika pengelola dana desa juga ditunjukkan dengan kurang berfungsinya lembaga adat dalam meningkatkan jiwa korsa